



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Imam Gunarto
2. Jabatan : KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3. NHK : 136647

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.541.350.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 46.850.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 46.850.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 46.850.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 133.600.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 167.200.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 460.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, Honda Vario Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 72.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.433.375.698
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.506.725.698
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.506.725.698

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.